

PERANAN SPN DALAM PEMBENTUKAN BINTARA POLRI YANG PROFESIONAL

(Ringkasan Eksekutif Hasil Penelitian oleh Sespim Polri Tahun 2006)

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pembentukan Bintara Polri yang Profesional dalam kerangka keamanan dalam negeri sekaligus saran penanggulangan berdasarkan kepada hasil analisis statistis yang dilakukan terhadap 1.687 responden di enam Polda, masing-masing Polda Sumbar, Polda Sumsel, Polda Jabar, Polda Kalsel, Polda Kaltim dan Polda Papua yang difokuskan pada sepuluh komponen pendidikan Sekolah Polisi Negara (SPN) sebagai berikut :

a. Kurikulum yang dipergunakan pada SPN-SPN diakui oleh para responden telah relatif memadai dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, namun demikian muatan yang ada dalam kurikulum belum cukup diimbangi oleh ketersediaan waktu yang memadai serta memungkinkan para siswa menyerap materi yang diajarkan secara baik. Ukuran-ukuran kuantitatif menjadi sangat dominan dan lebih mengemuka dibandingkan dengan tujuan utama menghasilkan sosok bintara Polri profesional.

b. Bahan Ajar pada SPN masih dirasa jauh dari harapan, hal ini menunjukkan bahwa kendala (antara lain kendala waktu/durasi pendidikan) yang dihadapi baik oleh para Gadik maupun para siswa SPN telah menyebabkan kurangnya kesempatan, baik Gadik dalam mengembangkan dan memvalidasi bahan ajar yang ada, maupun Siswa khususnya dalam menggunakan dan mempelajari bahan ajar yang ada bagi kegiatan belajar mengajar di SPN.

Pada beberapa SPN masih ditemukan kondisi Bahan Ajar berbanding siswa 1 : 2, artinya satu bahan ajar diperuntukan untuk dua orang siswa.

c. Metode Pembelajaran yang dipergunakan selama ini oleh para Gadik telah dirasakan sangat memadai oleh para siswa khususnya, hal ini menyangkut cara para Gadik dalam mendeliver materi pendidikan yang berdasarkan hasil observasi di lapangan selama penelitian ini dilakukan lebih bertumpu kepada praktek-praktek dan ceramah yang lebih bersifat "sharing experience", dimana Gadik lebih menggantungkan kepada kemampuannya dalam penceriterakan pengalaman-pengalaman yang relevan dengan materi saat bertugas. Kondisi ini di satu sisi dianggap sangat efektif, khususnya dalam membangkitkan minat para siswa untuk mendengar dan menyimak sesuatu atau pengalaman baru; namun di sisi lain berakibat pada tidak cukup optimalnya tujuan instruksional umum maupun khusus yang diharapkan oleh materi dimaksud. Tidak jarang

selama proses belajar mengajar Gadik tidak menggunakan Hanjar yang telah disiapkan.

d. Tenaga Pendidikan (Gadik) SPN secara umum dipersepsikan memiliki latar belakang pendidikan baik formal maupun pendidikan kepolisian yang relatif minim serta kemampuan intelektual yang terbatas, walaupun proses perekrutannya diakui telah cukup baik. Rendahnya benefit secara finansial serta jalur karir yang tidak cukup jelas bagi para Gadik merupakan salah satu hal yang tidak cukup menantang bagi para Gadik dalam mengembangkan diri.

e. Tenaga Kependidikan (Gadik) SPN memiliki kondisi yang nyaris sama dengan Gadik, yaitu memiliki pendidikan formal dan pendidikan kepolisian yang relatif rendah; terlebih menurut para responden penelitian ini, sistem rekrutmen bagi para Gadik tidak terlalu baik, sehingga peran dan pengaruhnya dalam membangun suatu entitas tempat para bintara Polri profesional dibentuk serta dididik belum optimal.

f. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap para siswa SPN sebagai pusat atau fokus di dalam penelitian ini juga menunjukkan sesuatu yang memprihatinkan, selain secara akademik memiliki prestasi yang relatif rendah, secara administratif juga banyak yang tidak atau kurang memenuhi syarat. Kondisi ini patut memperoleh perhatian secara bersama seluruh pihak yang terkait dengan pendidikan di SPN, terlebih dengan mengingat bahwa tuntutan akan keberadaan Polisi Sipil Profesional di era masyarakat madani mengharuskan kehadiran polisi-polisi muda dengan tingkat intelektualitas yang memadai. Selama ini pertimbangan intelektual belum cukup mengalihkan pertimbangan kesamaptaaan yang berkecenderungan mengarah pada seleksi yang lebih militeristik.

g. Fasilitas Pendidikan di SPN-SPN diakui oleh para responden cukup lengkap namun belum seluruhnya memadai dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan suatu pendidikan Bintara Polri yang dituntut profesional. Beberapa metode dalam pengajaran yang membutuhkan ruangan-ruangan diskusi kecil kurang terdukung, sehingga kelancaran proses belajar mengajar mengalami kendala. Fasilitas yang dianggap sangat kurang adalah fasilitas olah raga dan ruang makan serta barak. Hal ini sangat dapat dimaklumi karena di ketiga tempat inilah para siswa-berkeinginan menyalurkan hasrat rekreatif mereka setelah berjam-jam mereka harus berada di kelas yang relatif membuat mereka mudah sekali jenuh.

- h. Alin/Alongins di SPN masih sering terkendala oleh ketersediaan anggaran, sehingga peran dukungan yang diharapkan menjadi belum optimal. Hal yang secara umum dinyatakan sebagai kekurangan oleh para responden adalah ketersediaan komputer dan di beberapa SPN mengalami kesulitan dalam sistem suara (*sound system*).
- i. Sistem Evaluasi yang merupakan alat kontrol sekaligus *feedback* untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan di lingkungan SPN belum berjalan secara baik, hal ini menyebabkan hasil evaluasi yang dilakukan sering tidak dipergunakan sebagai bahan atau masukan utama pengambilan keputusan. Akibatnya evaluasi yang dilakukan lebih dilakukan sebagai suatu kewajiban dan prosedur standar yang lepas dari maksud dan tujuan strategis evaluasi itu sendiri.
- j. Anggaran SPN merupakan salah satu kendala utama yang berakibat pada sulitnya peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan SPN. Salah satu hal yang dianggap oleh responden kurang mendukung peningkatan kualitas sistem pembelajaran di SPN adalah rendahnya anggaran yang disediakan untuk pengembangan kemampuan SDM di SPN. Rendahnya kemampuan untuk meningkatkan baik *skills, knowledge* maupun *attitude* para Gadik dan Gadikan ini akan berakibat pada rendahnya kompetensi Gadik/Gadikan yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas hasil lulusan SPN itu sendiri.
- k. Mendasarkan kepada kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini, maka beberapa hal yang dirasa perlu untuk dilakukan guna mengantisipasi rendahnya kualitas lulusan SPN, disampaikan sebagai berikut :
- 1) Kurikulum
 - a) Melakukan validasi pola pendidikan 5 : 4 : 1. Kembali pada sistem pendidikan 11 bulan.
 - b) Melakukan validasi terhadap Muatan Kurikulum.
 - (1) Melakukan pengkajian terhadap jumlah mata pelajaran yang diberikan.
 - (2) Melakukan pengkajian terhadap waktu yang diberikan untuk setiap mata pelajaran.
 - 2) Bahan Ajar
 - a) Melakukan pengkajian terhadap relevansi bahan ajar dengan tantangan perkembangan lingkungan strategik, tantangan pendidikan, dan tantangan profesionalisme.
 - b) Melakukan pengadaan bahan ajar secara memadai dimana 1 (satu) orang siswa dapat memperoleh 1 (satu) bahan ajar, atau prinsip 1 : 1.
 - c) Memperkaya buku referensi yang relevan untuk menunjang pemahaman Mata Pelajaran yang diberikan di SPN.
 - 3) Metode Pendidikan, melakukan pengkajian terhadap metode pembelajaran yang dipergunakan dalam pendidikan dan pelatihan maupun pengasuhan berdasarkan standarisasi metode yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).
 - 4) Tenaga Pendidik (Gadik), melakukan Inventarisasi personil pada tiap SPN untuk :
 - a) Mengetahui tingkat rasio antara pendidik dengan siswa didik (pendidikan yang ideal 1 Gadik : 20 Siswa).
 - b) Mengetahui tingkat kualitas SDM Tenaga Pendidik.
 - c) Terbinanya karier Tenaga Pendidik secara **berkualitas**, artinya para Gadik dapat memiliki peluang untuk memiliki prestasi tinggi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
 - d) Terbinanya karier Tenaga Pendidik secara **merit system**, artinya para Gadik dapat memperoleh promosi jabatan berdasarkan kinerja (*performance*) yang dicapai. Dalam hal ini seorang Tenaga Pendidik (Gadik) ditunjuk berdasarkan kinerjanya, bukan asal tunjuk.
 - e) Terbinanya karier Tenaga Pendidik secara **moral**, artinya para Gadik dapat memiliki integritas yang tinggi, diterima secara positif oleh berbagai pihak.
 - f) Melakukan intensifikasi penugasan personel Gadik di SPN guna meningkatkan optimalisasi peran SPN dalam pembentukan Bintara Polri yang profesional.
 - g) Melakukan reorientasi kesejahteraan anggota dan keluarga penyelenggara SPN di tiap wilayah.
 - h) Melakukan optimalisasi pengawasan terhadap pendidikan, latihan dan pengasuhan dalam rangka meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik.
 - 5) Tenaga Kependidikan (Gadikan), melakukan Inventarisasi personil Gadikan pada tiap SPN untuk :
 - a) Mengetahui tingkat kualitas SDM Tenaga Kependidikan.
 - b) Terbinanya karier Tenaga Kependidikan secara **berkualitas**, artinya para Gadikan dapat memiliki peluang untuk memiliki prestasi tinggi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
 - c) Terbinanya karier Tenaga Kependidikan secara **merit system**, artinya para Gadikan dapat memperoleh promosi jabatan berdasarkan kinerja (*performance*) yang dicapai. Dalam hal ini seorang Tenaga Kependidikan (Gadikan) ditunjuk berdasarkan kinerjanya, bukan asal tunjuk.
 - d) Terbinanya karier Tenaga Kependidikan secara **moral**, artinya para Gadikan dapat memiliki integritas yang tinggi, diterima secara

- positif oleh berbagai pihak.
- e) Melakukan intensifikasi penugasan personel Gadikan di SPN guna meningkatkan optimalisasi peran SPN dalam pembentukan Bintara Polri yang profesional.
 - f) Melakukan reorientasi kesejahteraan anggota dan keluarga penyelenggara SPN di tiap wilayah.
 - g) Melakukan optimalisasi pengawasan terhadap pendidikan, latihan dan pengasuhan dalam rangka meningkatkan kualitas Tenaga Kependidikan.

6) Siswa

- a) Melakukan penataan standarisasi sistem penerimaan siswa SPN dalam aspek persyaratan akademik, metode penerimaan, ke arah terbentuknya sistem penerimaan yang transparan dan akuntabel.
- b) Memperbanyak calon siswa yang bersumber dari S1 dan D-3, sehingga dari segi kualitas akademik Bintara Polri menjadi lebih baik dan kualitas emosional lebih dewasa/matang.

7) Fasilitas Pendidikan, melakukan penataan sebagai berikut :

- a) Penetapan ruangan dan fasilitas pendidikan didasarkan pada kebutuhan jangka panjang.
- b) Perlunya perencanaan gedung dan fasilitas yang didasarkan kepada evaluasi periodik dan jadwal reguler pelaksanaan survey program pendidikan, proyeksi pendaftar/siswa pendidikan, prakiraan perkembangannya, dan hal-hal lain yang perlu diantisipasi.
- c) Perlunya proyeksi kebutuhan gedung/ruang dan fasilitas didasarkan kepada assessment terhadap kondisi dan kemampuan ruang atau fasilitas yang ada saat ini.
- d) Penataan gedung/ruang dan fasilitas disesuaikan dengan jenis, metode serta teknik yang dipergunakan untuk pendidikan.
- e) Gadik dan Gadikan yang pernah terlibat dengan pendidikan diminta pendapatnya terhadap gedung/ruang dan fasilitas yang ada.
- f) Ada konsultan profesional di bidang fasilitas, ruang ataupun gedung yang selalu memberikan masukan.
- g) Gedung dirancang dengan kondisi penerangan dan ventilasi yang dapat dikendalikan dengan baik.
- h) Gedung memiliki fasilitas dan ruang-ruang yang mudah pemeliharaannya serta efisien.
- i) Kemudahan ruang/kelas untuk dipergunakan sebagai kelas kecil, sedang dan besar; misalnya dengan membuat partisi ruangan (*sliding, folding atau accordion*).
- j) Ruangan kelas mudah dipasang berbagai peralatan elektronik, seperti kesediaan stop

kontak yang memadai, rel kabel (*back bone*), dlsb.

- k) Ukuran ruang kelas memadai untuk jumlah tertentu peserta pendidikan.
- l) Ruang cukup mendukung pelaksanaan pendidikan.
- m) Daya penerangan disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan pendidikan (diskusi, lab, konferensi, dlsb).
- n) Terdapat tempat untuk menaruh peralatan pengajaran, seperti OHP, Video Projector, Slide, dlsb.
- o) Jarak antar tempat duduk peserta mencukupi, sehingga peserta dapat leluasa bergerak.
- p) Ketersediaan *white board atau flip-chart* di dalam ruang kelas telah memadai.
- q) Ruangan telah memiliki *sound system* tersendiri, atau setidaknya memiliki peralatan *sound system wireles yang portable*.
- r) Kelas mudah dijangkau oleh siswa, Gadik maupun Gadikan.
- s) Memiliki kelas besar yang mampu menampung peserta dalam jumlah besar, khususnya bagi keperluan-keperluan seremonial (pembukaan /penutupan) pendidikan.
- t) Peralatan duduk yang awet dan efisien.
- u) Peralatan duduk mudah dipindahkan, sehingga mendukung aktivitas kelas yang membutuhkan perubahan secara dinamis.
- v) Kursi yang dipergunakan tidak mempercepat orang lelah (*ergonomis*).
- w) Ketersediaan meja untuk melakukan tulis-menulis.

8) Alin/Alongins

- a) Melakukan standarisasi alins dan alongins untuk pendidikan Bintara Polri di SPN yang dikaji secara terus menerus untuk dikembangkan baik kualitas, kuantitas, maupun nilai kegunaannya yang sesuai dan sinkron antara kebutuhan di SPN untuk pembelajaran/pelatihan dengan kebutuhan di lapangan untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas masing masing.
- b) Melalui standarisasi jenis alins dan alongins ini tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan /modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari masing masing SPN.

9) Sistem Evaluasi

- a) Pentingnya dilakukan evaluasi terhadap suatu pendidikan atau program pengembangan karena tidak ada satupun program pendidikan dan pengembangan yang sempurna di dunia ini.
- b) Dalam melakukan evaluasi perlu ditetapkan ukuran-ukuran efektif atau efisien terlebih da-

hulu, harus dapat menunjukkan fungsinya dengan baik, dan dapat dipertahankan sebagai alat ukur yang memang sesuai untuk organisasi tersebut.

c) Dalam perbaikan program pendidikan dipandang penting mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

- (1) Tujuan evaluasi dari masing-masing aspek operasional.
- (2) Penerapan dari imajinasi serta pemikiran kreatif seluruh sumber daya manusia organisasi yang terlibat.
- (3) Hasil observasi, ide, pemikiran dari para pegawai, Gadik maupun Gadikan.
- (4) Analisis kritis dan sintesa dari beberapa fakta, ide dan alternatif yang dikembangkan.
- (5) Sistematika, pengembangan berdasarkan waktu serta uji coba kebijakan serta prosedur untuk berbagai sumber daya (orang, peralatan, bahan baku, waktu, ruang dan uang).

d) Evaluasi program pendidikan dan pengembangan haruslah dilakukan secara konsisten, sesuai dengan tujuan, kegunaan pendidikan yang diharapkan organisasi, serta mengikuti prinsip-prinsip evaluasi baku, yaitu :

- (1) Evaluasi harus dilakukan sesuai tujuannya, agar seluruh pihak dapat mengerti sejauh mana mereka telah mencapai tujuan, kapan mereka melakukan kesalahan dan sejauh mana kesalahan tersebut berakibat.
- (2) Evaluasi harus bersifat kooperatif, evaluasi yang dilakukan oleh hanya satu orang akan lebih baik daripada tidak ada evaluasi sama sekali, tetapi bahwa evaluasi yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak jauh lebih baik daripada evaluasi oleh satu orang tersebut.
- (3) Evaluasi harus berkesinambungan, setiap penilaian yang dilakukan harus diikuti dengan analisis serta ditindak lanjuti. Aktivitas ini akan menjadi dasar dari proses perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Evaluasi harus bersifat spesifik, sehingga kita dapat memperoleh manfaat, khususnya dalam mengetahui bidang-bidang atau aspek-aspek mana yang masih harus diperbaiki, dikembangkan, dipertahankan atau bahkan harus diganti seluruhnya.
- (5) Evaluasi harus mampu menjadi alat yang baik bagi instruktur untuk menilai kinerja mereka selama pelaksanaan pendidikan,

sehingga instruktur mampu memperbaiki sikap, gaya serta cara-cara penyampaian materi yang dikehendaki oleh peserta pendidikan.

(6) Evaluasi harus berdasarkan pada keseragaman, metode-metode obyektif serta standar yang jelas.

e) Evaluasi pada program pendidikan dan pengembangan harus merupakan sebagai salah satu bentuk dari proses pemecahan masalah. Terdiri atas beberapa tahapan yang harus ditindak lanjuti, tingkat penerimaan atau pengakuan terhadap kekurangan atau kelebihan, atau bahkan ketidakpuasan yang terjadi. Dari evaluasi inilah seluruh pihak berharap dapat serta mampu mengenali pelbagai permasalahan yang terjadi, mencari alternatif pemecahan dan memilih alternatif terbaik sebagai jalan keluar terbaik.

f) Evaluasi pada program pendidikan hendaknya mengikuti tahapan dan alur tertentu yang sangat mirip dengan tahapan-tahapan yang dilalui untuk suatu proses pemecahan masalah. Pertama kali, kebutuhan akan evaluasi haruslah benar-benar dikenali, kemudian area yang hendak dievaluasi ditetapkan, serta ukuran-ukuran keberhasilan disepakati dulu; kemudian evaluator harus mengajarkan bagaimana menggunakan perangkat evaluasi tersebut kepada pihak-pihak yang akan membantunya.

Akhirnya sampai kepada pengecekan hasil evaluasi yang dilakukan, apakah telah memenuhi tujuan, atau harus dilakukan perbaikan.

g) Evaluasi terhadap program pendidikan hendaknya dilakukan sesuai dengan tingkatan evaluasinya mengingat karakteristik dari masing-masing tingkatan membutuhkan perhatian serta teknik evaluasi yang berbeda-beda pula, yaitu :

(1) Evaluasi pada tingkat organisasi Polri (Lemdiklat Polri), setidaknya terdapat 7 (tujuh) hal yang harus dipertimbangkan, meliputi :

- (a) Strategi Pendidikan dan Pengembangan yang dipergunakan.
- (b) Dokumentasi kebijakan bagi pendidikan dan pengembangan.
- (c) Identifikasi kebutuhan pembelajaran.
- (d) Perencanaan Pendidikan Pengembangan.
- (e) Strategi dan perencanaan dari pengembangan fungsi.
- (f) Perencanaan karir dan kinerja staf.
- (g) Keterkaitan dengan organisasi.

- (2) Evaluasi pada tingkat Polda, memperhatikan beberapa hal antara lain :
- (a) Perancangan pendidikan
 - (b) Penyampaian
 - (c) Pelaksanaan evaluasi
 - (d) Identifikasi kebutuhan
- (3) Evaluasi pada tingkat SPN
- h) Untuk mengetahui sukses atau tidaknya suatu sistem evaluasi bagi aktivitas pendidikan dan pengembangan perlu mempertimbangkan beberapa hal kritis yaitu :
- (1) Dukungan Pimpinan Puncak Polri. Karena tanpa dukungan yang kuat serta komitmen yang baik dari para pimpinan puncak organisasi, maka sistem akan sulit berjalan dan banyak sekali pihak yang akan melanggar atau tidak mematuinya.
 - (2) Ketrampilan kepemimpinan yang dimiliki. Khususnya bagi para pegawai yang terlibat di dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu diklat, dibutuhkan ketrampilan kepemimpinan yang baik, sehingga seluruh pegawai dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan bakat, ketrampilan serta minatnya masing-masing.
 - (3) Keterlibatan secara total. Dimana seluruh pegawai, Gadik maupun Gadikan yang terlibat mampu secara total mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya pada sistem yang mereka bangun sendiri. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu evaluasi.
 - (4) Komunikasi dan koordinasi yang efektif, mengingat di dalam suatu pelaksanaan pendidikan dan pengembangan, permasalahan koordinasi dan komunikasi merupakan hal vital dan sangat menentukan keberhasilan bagi suatu pelaksanaan pendidikan.
 - (5) Penggunaan struktur formal yang jelas akan memudahkan proses evaluasi, seperti pembentukan bidang atau unit "Bina Program" dengan tugas antara lain pelaksanaan evaluasi akan sangat baik dibandingkan dengan membentuk gugus tugas khusus evaluasi; atau bahkan menjadikannya sesuatu yang lebih bersifat "informal" semata.
 - (6) Target atau sasaran yang realistis, khususnya dikaitkan dengan "sense of urgency", sehingga harapan tidaklah terlalu muluk-muluk; yang belum tentu dapat dicapai.
 - (7) Rapat-rapat yang teratur, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses pendidikan dan pengembangan akan sangat bermanfaat dan dapat menghindarkan berbagai ketidak sempurnaan penyelenggaraan evaluasi.
- (8) Laporan yang lengkap atau menyeluruh atas hasil evaluasi yang dilakukan merupakan hal yang sangat penting, agar seluruh pihak-pihak yang terkait mengetahui dan dapat menarik manfaat yang setinggi-tingginya.
- (9) Umpan balik, merupakan hal yang perlu dilakukan agar dapat menjadi dasar bagi upaya-upaya perbaikan berkelanjutan, khususnya dikemudian hari.
- i) Untuk mengukur keberhasilan sistem evaluasi pendidikan dan pengembangan sebaiknya memperhatikan dua pendekatan yang biasanya saling melengkapi, yaitu :
- (1) Evaluasi eksternal, dimana nilai-nilai yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu aktivitas pendidikan dan pengembangan, didasarkan kepada nilai-nilai normatif yang ada; atau bahkan organisasi lain.
 - (2) Evaluasi Internal, dimana evaluasi menggunakan patokan-patokan yang ada di dalam organisasi Polri, dalam bentuk :
 - (a) Penilaian atau evaluasi dari para peserta pendidikan, hal ini paling sering dilakukan oleh berbagai organisasi; di mana para peserta diminta memberikan pendapatnya atas berbagai hal selama pendidikan berlangsung. Beberapa organisasi hanya menggunakan model check list, namun beberapa organisasi menggunakan model open question; atau gabungan dari keduanya.
 - (b) Perbandingan dengan norma yang berlaku, yaitu membandingkan apa yang diperoleh nanti dengan norma atau kelayakan yang telah disepakati bersama selama ini.
 - (c) Perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu harapan-harapan yang ingin dicapai organisasi.
 - (d) Pengukuran atas perubahan perilaku yang terjadi. Biasanya dengan menggunakan proses *assessment center*, dapat diketahui apakah seseorang sebelum/sesudah mengikuti pendidikan mampu mengubah perilakunya atau tidak. Hal ini tergantung pada tujuan

awal pendidikan; adakah perilaku-perilaku tertentu dalam diri seseorang perlu diperbaiki atau tidak; setelah itu barulah proses assessment dapat dilakukan.

- (e) Berdasarkan reaksi peserta, yaitu dengan cara mengamati bagaimana reaksi peserta setelah mengikuti suatu pendidikan tertentu. Cara ini sering dilakukan dengan jalan menanyakan langsung pendapat peserta atas hal-hal tertentu, seperti sikap, gaya dan kebiasaan Gadik dalam mengajar, menu makan siang, keramahan penyelenggara; dlsb. Kadang evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner.
- (f) Pengukuran dengan menggunakan standar-standar khusus, yaitu bagi ketrampilan - ketrampilan tertentu, keberhasilan suatu program pendidikan dapat bersifat langsung diukur; seperti ketrampilan mengetik dengan komputer .
- (g) Penelitian percobaan, yaitu model yang digunakan untuk melengkapi

berbagai metode yang ada selama ini; dengan cara memodifikasi atau bahkan merubah secara total sistem evaluasi yang selama ini dipergunakan.

10) Anggaran

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran bagi SPN dalam kaitannya dengan penambahan fasilitas pendidikan, peningkatan pemeliharaan fasilitas pendidikan dan lainnya, diharapkan dapat terpenuhi melalui beberapa program penggalangan dana yang dipandang cukup relevan sesuai dengan karakteristik wilayahnya, antara lain berupa :

- a) Pemberdayaan Dewan penyantun.
- b) Membangun kerjasama dengan donatur dalam dan luar negeri.
- c) Membangun kerja sama dengan sponsor, atau pengusaha setempat untuk menggarap lahan yang dimiliki SPN (sangat memungkinkan untuk beberapa SPN seperti SPN Betung di Sumatera Selatan yang memiliki tanah sangat luas dan belum digarap secara produktif) untuk ditanami tanaman yang produktif berupa tanaman keras maupun sayuran dimana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan siswa maupun kesejahteraan penyelenggaraan pendidikan. **

TIP'S

KERETA BELANJA

Sarang Kuman

Tahukah anda jika kereta belanja di supermarket merupakan sarang kuman penyakit ? Hal itu karena pegangan pada alat tersebut dipegang puluhan bahkan ratusan orang dalam sehari. Jadi, berbagai virus

dan bakteri bisa ditularkan dari satu orang ke orang lainnya. Berdasarkan penelitian tim dari laboratorium lingkungan Universitas Arizona selama empat tahun, pada sebuah pegangan kereta belanja minimal terdapat ludah, ingus, urine, kotoran manusia, serta darah dan cairan daging mentah. Penelitian itu dilakukan terhadap berbagai kereta belanja di tiga puluh enam supermarket di San Fransisco, Chicago, Tucson dan Tampa. Dan dari penelitian itu diketahui bahwa pegangan kereta belanja merupakan barang publik ketiga paling menjijikan setelah mainan di taman bermain dan pegangan di bus umum. Sebagai sarang kuman, pegangan kereta belanja bahkan lebih parah daripada toilet umum. Bakteri dan virus seperti E-coli, staphylococcus, salmonella, dan influenza umum ditemukan di pegangan kereta dorong tersebut.**